

KPK Lelang Apartemen hingga Rumah Hasil Rampasan dari Koruptor

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya serta Pekanbaru melelang unit apartemen hingga rumah.

Ali membeberkan, KPKNL Surabaya bakal melelang Apartemen Graha Golf, Tower Alexa, Lantai 1, Unit 106, tipe 3 BR, luas unit 141 M2 atas nama PT. Handaya Citraniaga yang berlokasi di Jalan Raya Golf Graha Famili, Dukuh Pakis, Surabaya (tidak dilengkapi bukti kepemilikan) dengan harga limit Rp5.919.724.000 dan uang jaminan Rp1.000.000.000.

Sementara KPKNL Pekanbaru, rencananya akan melelang satu bidang tanah dan bangunan berupa rumah tipe 150/182 dengan luas tanah 182 M2 sesuai dengan SHM No.8763 atas nama Jhon Mart Purbu.

Rumah tersebut berada di dalam kompleks Abinaya Residence Blok C No. 5 yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Dilengkapi dengan bukti kepemilikan) dengan harga limit

Rp931.526.000 dan uang jaminan Rp200.000.000.

Kemudian, satu unit bidang tanah dan bangunan berupa rumah type 90/168 dengan luas tanah 168 M2 sesuai dengan SHM No.8770 atas nama Jhon Mart Purbu. Rumah tersebut berada di dalam Komplek Abinaya Residence Blok F No. 5 yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan harga limit Rp658.906.000 dan uang jaminan Rp150.000.000

Selanjutnya, satu bidang tanah dan bangunan dalam satu hamparan yang dijual dalam satu paket berupa rumah type 70/177 dengan luas tanah 177 M2 sesuai dengan SHM No. 9094 dengan luas 117 M2 atas nama Ando Pasti Aman Damanik dan SHM No. 9093 dengan luas 60 M2 atas nama Jhon Mart Purbu.

Adapun, rumah tersebut berada di dalam Komplek Abinaya Residence Blok I Nomor 10 yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan harga limit Rp400.924.000 dan uang jaminan Rp100.000.000. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PRESIDEN AKAN KELUARKAN INPRES TERKAIT

REKOMENDASI PPHAM
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menkumham Yasonna H Laoly (kedua kanan), Mensos Tri Rismaharani (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan pers sesuai pertemuan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1). Pertemuan membahas hasil temuan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM), dan Presiden akan mengeluarkan Inpres untuk menyelesaikan rekomendasi tim itu.

Jokowi Akan Temui Para Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Dalam dan Luar Negeri

Presiden Jokowi memberi perhatian khusus untuk penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Kejagung diminta koordinasi dengan Komnas HAM.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menemui para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Hal ini sebagai bentuk keseriusannya dalam menjalankan rekomendasi dari Tim Penye-

lesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM). "Di antara yang secara seremonial untuk ditunjukkan kepada publik bahwa kami bersungguh-sungguh mungkin dalam waktu dekat

presiden akan berkunjung ke beberapa daerah misalnya ke Aceh, kemudian Talangsari," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/1).

Presiden Jokowi, kata Mahfud, juga akan bepergian ke luar negeri untuk bertemu dengan para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Dan di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena

mereka banyak sekali terutama di Eropa Timur, untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang sama," kata Mahfud.

"Nanti mungkin akan dikumpulkan di Jenewa, atau di Amsterdam atau di Rusia atau dimana. Pak Menkumham dan Menlu bersama saya ditugaskan untuk menyiapkan itu, sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri dan tim ini tidak main-main," kata Mahfud.

Khusus penyelesaian yudisial, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM. Sebab, penyelesaian yudisial penyelesaiannya adalah jalur sendiri, sedangkan penyelesaian non yudisial sifatnya lebih kemanusiaan.

"Yang PPHAM ini lebih memperhatikan korban, sedangkan yang yudisial itu mencari pelakunya. Jadi, antara korban dan pelaku kita bedakan, yang pelaku ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa peristiwa HAM berat terjadi di berbagai peristiwa

yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 2000.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa hak asasi manusia yang berat," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/1).

Peristiwa itu antara lain : Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

Kemudian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan Peristiwa Jambor Keupok, Aceh 2003. ● mar



FOTO: ANT

RAPAT KERJA KOMISI IV DENGAN MENTERI PERTANIAN

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1). Rapat membahas tentang pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2023.

Anggaran KPK untuk 2023 Turun Rp26 M Dibanding Tahun Sebelumnya

JAKARTA (IM) - Anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 turun Rp 26 miliar dibanding anggaran 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, pada 2022, pihaknya mendapatkan kucuran dana Rp 1.303.673.972.000 atau Rp 1,3 triliun dari negara. Dari jumlah itu, terserap anggaran Rp 1.266.705.044.822 atau Rp 1,2 triliun.

Anggaran KPK berikut serapannya pada 2022 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Terkait perencanaan anggaran 2023, KPK telah bernegosiasi dengan pemerintah dan DPR. Padamulanya KPK hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1.035 miliar atau Rp 1,035 triliun. Pihaknya kemudian mengusulkan agar anggaran lembaga antirasuah ditambah Rp 241,1 miliar. Permohonan itu dikabulkan sehingga pagu anggaran KPK yang dikukuhkan Rp 1.276,7 miliar.

Pada September tahun lalu, KPK juga telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 423 miliar. "Namun, usulan terse-

but tidak dapat dipenuhi sehingga pagu definitif kita ditetapkan oleh pemerintah Rp 1.276,7 miliar," tutur Firli.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan rincian anggaran setiap deputi lembaga antirasuah untuk menunjang kinerja 2023. Sekretariat Jenderal (Setjen) KPK yang menaungi 454 pegawai mendapatkan anggaran dengan jumlah Rp 807.955.428.000.

Kemudian, Kedepuan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dengan 89 SDM mendapatkan anggaran Rp 63.221.015.000, Kedepuan bidang Pencegahan dan Monitoring dengan 160 pegawai mendapat kucuran Rp 53.297.606.000.

Selanjutnya, Kedepuan bidang Penindakan dan Eksekusi KPK yang menaungi 452 pegawai mendapat anggaran Rp 57.765.038.000, Kedepuan bidang Koordinasi dan Supervisi dengan 108 pegawai mendapatkan anggaran Rp 28.485.217.000.

Selanjutnya, Kedepuan bidang Informasi dan Data yang menaungi 282 pegawai mendapat kucuran dana Rp 192.601.533.000. ● han

LPSK Minta Penerapan Restorative Justice Tak Bergeser Jadi Keadilan Transaksional

JAKARTA (IM) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suryo berharap *restorative justice* atau keadilan restoratif yang digaungkan beberapa waktu belakangan ini, tidak bergeser menjadi keadilan transaksional.

Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (16/1). Hasto mengungkapkan bahwa LPSK telah bergabung dalam tim Kelompok Kerja (Pokja) *restorative justice* atau keadilan restoratif peradilan pidana yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

"(LPSK) sebagai wadah koordinasi antarpengak hukum agar adanya satu kesepahaman penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana," kata Hasto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Berkaca dari tugas tersebut, Hasto tak ingin keadilan restoratif justru dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki ekonomi tinggi. Ia khawatir, jika demikian, maka keadilan seolah bisa

dibeli. LPSK berharap implementasi *restorative justice* tidak bergeser menjadi keadilan transaksional yang memberikan kesempatan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi atau kuat bisa membeli keadilan," ujar Hasto.

Pernyataan tersebut direspons positif oleh anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun.

Politikus PKS ini meminta pernyataan LPSK perlu dikritisi lebih dalam. Pasalnya, ia mencium adanya upaya jual menjual keadilan restoratif.

"Saya minta keadalan, ini enggak main-main ya, karena saya lihat di lapangan ini *restorative justice* ini udah mulai jual-menjual," kata Adang Daradjatun.

Terbanyak Jakarta

Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkapkan, masyarakat Provinsi DKI Jakarta paling banyak melakukan meminta perlindungan sepanjang 2022. Jumlah warga DKI Jakarta yang minta perlindungan ke LPSK mencapai 1.292 permohonan.

"Kemudian disusul Jawa

Barat 850 permohonan, dan Jawa Tengah 751 permohonan," kata Hasto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (16/1).

Di sisi lain, Hasto juga mengungkapkan terdapat sebanyak 340 permohonan yang diterima, tetapi tidak diketahui asalnya.

"Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan pemohon tidak terpenuhi," ujarnya.

Jumlah total pengajuan yang diterima LPSK sepanjang 2022 sebanyak 7.777 berkas. Jumlah tersebut meningkat 232 persen dibandingkan tahun 2021.

"Jumlah pengajuan yang diterima mengalami peningkatan 232 persen dibandingkan 2021 yang sebanyak 2.341 permohonan," kata Hasto.

Peningkatan jumlah permohonan yang cukup mencolok yang diterima LPSK terkait tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, sebanyak 3.725 permohonan terkait kasus investasi ilegal robot trading. Kemudian, terkait kasus HAM berat, jumlah permohonan yang diterima sebanyak 600 berkas. ● mei



SIDANG TUNTUTAN KUAT MA'RUF

Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kuat Ma'ruf (tengah) berjalan keluar usai mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/1). Jaksa Penuntut Umum menuntut Kuat Ma'ruf dengan hukuman delapan tahun penjara.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN PT SHANTIKA VALUINDO LESTARI, berkedudukan di Jakarta Timur

Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia, PT Prima Karya Sarana Sejahtera dan PT Satkomindo Mediyasa masing-masing merupakan yayasan dan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia ("Pihak Yang Akan Mengambil Alih"), dengan ini bermaksud melakukan pengambilalihan sejumlah 2.500 saham dalam PT Shantika Valuindo Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, yaitu milik Ny. Hartanti Yuniari S Eddy A, Ny. Ratna Cempaka, Ny. Dra. Gusti Ayu Sri Pujawarini, Ny. Sikajanti Widjaja dan Ny. Drg. Edliany Kemandjaja.

Pengambilalihan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada PT Shantika Valuindo Lestari, berkedudukan di Jakarta Timur. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Kreditor atau pihak ketiga lainnya yang memiliki kaitan dengan PT Shantika Valuindo Lestari, berkedudukan di Jakarta Timur, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Pihak Yang Akan Mengambil Alih, dengan alamat:

Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia, PT Prima Karya Sarana Sejahtera dan PT Satkomindo Mediyasa
Jl. Sultan Iskandar Muda nomor F 25, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia
Direksi PT Prima Karya Sarana Sejahtera
Direksi PT Satkomindo Mediyasa